Pluralisme, Politik Identitas dan Krisis Identitas

Eric Hiariej

Buya Syafii mengkhawatirkan kemunculan apa yang ia pahami sebagai "politik identitas". Gerakan-gerakan yang berbasis politik identitas, menurutnya, membahayakan masa depan Indonesia karena cenderung anti-pluralisme, anti-demokrasi dan anti-nasionalisme. Secara historis politik identitas di negeri ini bisa bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik. Tapi yang paling perlu diwaspadai, dalam pandangan Buya, adalah kelompok-kelompok radikal dan setengah radikal yang berbaju Islam, yang mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang mulanya berpusat di beberapa negara Arab. Sekalipun beragam, semua gerakan Islamis dan Salafi sama-sama menuntut pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara.

Selain membahayakan, Buya Syafii yakin, tuntutan pelaksanaan Syari'ah Islam sulit diterima karena bersifat ahistoris. Para pendukungnya gagal atau bahkan tidak mau menerima dan hidup bersama dengan perubahan zaman. Isi kepala mereka masih dikerangkeng oleh cara berpikir Islam klasik yang mempertentangkan antara *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*. Sementara dunia sudah berubah, dan karenanya tidak bisa lagi dilihat dalam kerangka *Islam and the West,* melainkan dalam konteks *Islam in the West,* beban konsep klasik yang ketinggalan zaman tersebut menimbulkan kesalahkaprahan. Di

Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya, sambil menyitir Bassam Tibi, kesalahkaprahan ini, catat Buya, tampil dalam bentuk upaya meng-Islam-kan Eropa.

Gagasan meng-Islam-kan Eropa (atau Indonesia) adalah sebuah ketidakcerdasan. Buya mengutip Murad Hoffman untuk menegaskan bahwa sikap anti-pluralisme bukan saja tergolong cara berislam yang kurang sehat, tapi juga menunjukkan sebuah kemunduran yang serius. Pluralisme dalam hal ini berkaitan erat dengan intelektualitas. Kegagalan para Islamis dan Salafis menerima demokrasi, pluralisme dan hak-hak asasi manusia berhubungan dengan ketidakmampuannya mengkritik-diri, bergaul dengan orang-orang dari beragam latar belakang kultur dan etnisitas, dan membaca literatur sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, bagi penduduk Muslim diaspora di negara-negara Barat yang berpandangan kemanusiaan yang luas dan terdidik, politik identitas berlabelkan Islam bukan pilihan. Kelompok yang terakhir ini tidak merasa terkucilkan dan melihat dirinya sebagai bagian dari masyarakat tempat dirinya berada, bekerja dan mencari nafkah. Di sini meng-Eropa-kan (atau meng-Indonesia-kan) Islam merupakan pilihan dengan konsekuensi kesediaan menafsirkan ajaran-ajaran Islam secara lebih longgar dan terbuka.

Salah satu aspek yang penting dari pidato Buya Syafii adalah penggunaan istilah "politik identitas". Sayangnya Buya tidak cukup jelas menerangkan apa yang sesungguhnya ia pahami dengan terminologi tersebut. Pidatonya juga tidak memberitahukan secara gamblang bagaimana dan mengapa kebangkitan politik identitas bisa mengancam pluralisme, demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Persoalan-persoalan ini perlu diajukan karena dalam tradisi besar studi-studi tentang gerakan sosial dan aksi sosial, politik identitas tidak dilihat sebagai ancaman.

Dalam studi-studi gerakan sosial itu, terminologi politik identitas mengacu pada gerakan yang berusaha membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya. Argumennya, kepentingan kelom-

pok dan individu yang didefenisikan menurut kategori-kategori seperti ras, etnis, agama, gender dan orientasi seksual sulit atau bahkan tidak bisa dipromosikan oleh agen-agen yang berbasis kelas dan negara-bangsa. Politik identitas karenanya berkaitan erat dengan upaya memperjuangkan hak-hak dan pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok minoritas. Politik identitas merayakan keragaman kultural dan hak untuk berbeda, dan pengakuan terhadap perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang *legitimate*. Seiring menguatnya fenomena ini, pengorganisasian politik kontemporer juga sebaiknya dipahami dalam konteks persaingan saling mengutamakan identitas oleh kelompok-kelompok dan individu-individu yang berbeda.

Artinya, berbeda jauh dengan pandangan Buya Syafii, politik identitas bukan saja merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, tapi juga sangat berkepentingan dengan pluralisme dan demokrasi. Studi-studi poskolonial, sebagai perspektif yang tergolong radikal dalam tradisi studi politik identitas, bisa digunakan sebagai contoh. Poskolonialisme mengaitkan identitas dengan problematika multikulturalisme yang dihadapi kelompok-kelompok minoritas yang tertindas. Identitas adalah persoalan memperjuangkan hak untuk menarasikan (*right to narrate*) pengalamannya menjadi korban kolonialisme, yang ditimbulkan oleh mekanisme kekuasaan yang menolak dan menekan *otherness*. Perspektif ini karenanya mengajarkan bahwa inti eksploitasi poskolonial terletak pada ketidakmampuan bersikap toleran terhadap orang lain. Lebih jauh lagi, sikap tidak toleran berakar pada ketidakmampuan yang serupa dalam menghadapi *"Stranger in Ourselves"*, yakni soal ketidakberdayaan dalam menghadapi bagian dari dalam diri sendiri yang ditekan terus menerus.

Jika pengetahuan sederhana ini digunakan untuk membaca ulang pidato Buya, gagasan-gagasan yang ia kemukakan menjadi problematik. Pertama, taruhlah istilah politik identitas yang ia gunakan bisa diterima sebagai bentuk konseptualisasi yang diterapkan

untuk memahami apa yang ia sebut sebagai gerakan-gerakan Islam radikal dan setengah radikal. Implikasinya, para Islamis dan Salafis tersebut boleh dilihat sebagai minoritas tertindas yang sedang memperjuangkan hak menceritakan pengalamannya menjadi korban. Gerakan-gerakan Islam radikal dengan kata lain sedang berusaha keras untuk didengarkan dan mendapatkan tempat atau menjadi bagian dari sebuah masyarakat multikultural—dan, menurut harapan dan cita-cita Buya, pro-pluralisme. Dalam hal ini menjadi radikal bukan persoalan, apalagi sesuatu yang harus dikhawatirkan. Sebab radikalisme lebih bermakna perlawanan atau bahkan pemberontakan terhadap penindasan dan situasi menjadi korban. Begitu pula, menjadi Islamis dan Salafis tidak harus diributkan jika keduanya adalah identitas atau lebih tepatnya soal hak menceritakan diri dan subyektifitas tertentu.

Sudah tentu cara berpikir ini tidak serta merta membebaskan kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia dari beberapa persoalan yang dalam pandangan umum terlanjur dianggap melekat dengan mereka, seperti kekerasan. Tapi radikalisme tidak identik dengan, misalnya, terorisme, seperti halnya perlawanan tidak sama artinya dengan kekerasan. Selalu ada jarak antara radikalisme dan kekerasan yang harus ditempuh seorang aktivis sebelum yang bersangkutan sampai pada keputusan, misalnya, menjadi pembom bunuh diri. Karenanya, jika kekerasan adalah salah satu persoalan yang perlu diselesaikan berkenaan dengan kelompok-kelompok Islam radikal, penyelesaian tersebut logisnya tidak harus berarti membuat mereka berhenti menjadi radikal. Sebab radikalisme pada dasarnya adalah sebuah perlawanan terhadap dominasi. Upaya "deradikalisasi" justru berpotensi besar mendiamkan beberapa isu *genuine* yang menjelaskan mengapa mereka melawan seperti penindasan, ketidakadilan dan situasi menjadi korban. Sejalan dengan itu mengatasi persoalan kekerasan juga jangan sampai membuat kelompok-kelompok tersebut berhenti menjadi Islamis dan Salafis, setidaknya seperti apa yang mereka pahami dan narasikan. Sebab "Islamisme" dan "Salafisme"

yang mereka representasikan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses melawan.

Dalam konteks ini Buya Syafii perlu berhati-hati. Kekhawatirannya terhadap radikalisme pertama-tama bisa dilihat sebagai kegagalan sederhana dalam menemukan jarak dan hubungan yang lebih kompleks antara radikalisme dan kekerasan. Kegagalan ini tampak ketika kekerasan diidentikkan dengan radikalisme atau ketika secara gegabah diperlakukan sebagai produk tak terhindarkan dari radikalisme bahkan tanpa penjelasan yang memadai. Tapi yang jauh lebih penting, kekhawatiran yang sama mudah dibaca sebagai sikap negatif terhadap perlawanan. Sikap ini lebih jauh mengesankan ketidakpekaan akut terhadap persoalan-persoalan penindasan dan ketidakadilan. Buya tampaknya pasti menolak kekerasan. Hanya saja penolakan itu mustinya tidak memiskinkan perlawanan terhadap represi dan dominasi. Penolakan terhadap radikalisme bukan saja kurang tepat dalam hal upaya menyudahi kekerasan, tapi juga kurang berpihak kepada kelompok tertindas dan korban.

Kedua, kemungkinan lain, yang tampak lebih dekat dengan posisi Buya, adalah gerakan-gerakan Islam radikal tetap dilihat sebagai wujud politik identitas tanpa harus dikaitkan dengan perlawanan kelompok minoritas yang menuntut hak untuk menarasikan pengalaman menjadi korban. Para Islamis dan Salafis tak lain dari orang-orang yang memperjuangkan identitas dengan memamerkan simbol-simbol, menampilkan cara berpikir dan mengedepankan tuntutan-tuntutan yang bukan saja "ahistoris", tapi yang paling penting membahayakan pluralisme. Sayangnya Buya Syafii tidak pergi lebih jauh dari sekadar mengkhawatirkan masa depan masyarakat Indonesia yang multikultural. Pidato tersebut kemudian cenderung berhenti ketika kesan negatif terhadap gerakan-gerakan Islam radikal sebagai ancaman terhadap pluralisme sudah terbangun. Padahal mengetahui mengapa para aktivis radikal memperjuangkan identitas tertentu dan membentuk dirinya dengan cara dan penampilan yang khas adalah isu yang perlu diperhatikan. Sebab pengeta-

huan tentang isu ini bisa membantu menjelaskan mengapa politik identitas *a la* kelompok-kelompok Islamis dan Salafis justru berujung pada sikap anti-pluralisme seperti yang dikhawatirkan Buya.

Tapi untuk itu makna politik identitas perlu dipikir ulang. Pertama-tama politik identitas tidak melulu soal perjuangan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitasnya. Cara pandang ini cenderung mengasumsikan adanya identitas yang utuh dan stabil sebagai basis perlawanan. Persoalannya gagasan tentang identitas yang utuh, stabil dan pasti adalah model identitas lama yang sedang mengalami krisis. Identitas bukan saja tidak bisa lagi dilihat sebagai entitas yang statik dan memiliki makna yang konstan, tapi bahkan terbentuk melalui proses-proses yang melibatkan *play of difference*, sering berada di luar kendali pemilik identitas dan serba di permukaan. Sensibilitas yang berbeda ini tidak bermaksud menolak politik identitas, tapi hendak membebaskannya dari berbagai bentuk *essentialism* dalam setiap upaya memperjuangkan pengakuan dan hak-hak minoritas. Sebab *essentialism* bisa berujung pada opresi dan marginalisasi identitas-identitas yang lain.

Di sini perjuangan identitas para Islamis dan Salafis adalah upaya memulihkan identitas itu sendiri dari krisis, menjadikannya kembali sebagai entitas yang setidak-tidaknya utuh, stabil dan bermakna tetap. Pemulihan identitas merupakan jawaban terhadap bentuk-bentuk opresi yang spesifik, yakni opresi yang beroperasi pada level diri, subyektifitas dan kehidupan sehari-hari yang dialami para aktivis radikal. Opresi jenis ini bukan saja merampas kebebasan, tapi juga menggoyahkan makna dan nilai yang sebelumnya menjadi sumber panduan bagi setiap tindakan para aktivis. Perlawanan karenanya bersifat *self defence* dan protektif dengan efek membebaskan dan menciptakan kepastian (*certainty*) bagi para pelakunya. Dengan lain perkataan, politik identitas gerakan-gerakan Islam radikal adalah proyek memproduksi identitas. Tapi identitas yang terbentuk bukan simbolisasi dari kebebasan, melainkan memberi implikasi baginya. Kebebasan (dan kepastian) tidak identik dengan identitas, tapi

merupakan produk akhir dari keseluruhan proses membentuk identitas. Sebagai contoh, mengenakan hijab bukan sebuah tanda kebebasan, tapi sebuah proses memproduksi identitas baru yang ujung-ujungnya menciptakan kebebasan dan makna yang memberi kepastian bagi pemakainya. Sudah tentu identitas baru yang tercipta bersifat kaku dan ketat, dalam rangka menciptakan batas-batas yang jelas antara para aktivis dengan wilayah sekitarnya, dan karenanya cenderung tampil dalam wajah garang dan tidak toleran. Tapi tampaknya hanya dengan itu identitas bisa melindungi para penciptanya dari opresi yang berlangsung pada level diri, subyektifitas dan kehidupan sehari-hari.

Artinya, kebangkitan gerakan-gerakan Islam radikal sudah pasti menimbulkan persoalan bagi masyarakat Indonesia yang bercorak multietnik, multiagama dan multibudaya. Tapi kebangkitan para Islamis dan Salafis hanya simtom dari persoalan besar yang menyangkut penindasan yang bekerja pada wilayah paling privat dari manusia yang membuat orang sulit bersikap pluralis. Para aktivis radikal misalnya melalui proses identifikasi dengan "teman" dan negasi dengan "musuh" dalam mendefenisikan siapa dirinya. Mereka menjadi tidak toleran dan anti-pluralisme bukan karena menegasikan *other* sebagai musuh. Tapi lantaran *other* diperlakukan sebagai "musuh" yang tidak punya hak untuk hidup dan perlu dibasmi. Memperlakukan *other* dengan cara demikian bisa dipersoalkan sebagai perilaku sosial yang tidak sehat dalam konteks masyarakat multikultural. Tapi perlakuan semacam ini adalah produk historis tertentu yang perlu dikaitkan dengan persoalan penindasan dan perlawanan. *Dalam kondisi sosio-historis tertentu, misalnya,* other *yang dinegasikan bisa diperlakukan sebagai* adversary*, yakni sebagai "musuh" yang tetap punya hak untuk hidup*. Tidak cukup jelas seberapa jauh Buya Syafii menyadari implikasi yang bisa timbul dari upayanya membaca gerakan-gerakan Islam radikal sebagai wujud politik identitas terhadap gagasan-gagasan tentang pluralisme seperti yang baru saja diuraikan.

Sudah tentu pidato Buya perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Sekalipun kekhawatirannya terhadap politik identitas masih problematik, kepentingannya mengedepankan pluralisme perlu didukung. Tapi justru di sini masalah lain muncul, yang bisa jadi lebih serius dan memerlukan perhatian yang lebih luas dari ruang yang tersedia dalam tulisan ini. Pertanyaannya, jika menghargai dan bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda merupakan prinsip mendasar, bagaimana sesungguhnya pluralisme menghadapi gerakan-gerakan Islam radikal, kelompok yang untuk gampangnya dilabelkan saja sebagai para anti-pluralisme? Pertanyaan ini perlu diajukan sebab penolakan merupakan respons yang umumnya diberikan. Padahal penolakan itu sendiri mempertontonkan keterbatasan pluralisme.

Tampaknya kesediaan menerima perbedaan orang lain tidak seradikal yang dibayangkan. Dalam konteks kemunculan kelompok-kelompok Islamis dan Salafis *other* hanya diterima sepanjang *other* tidak memiliki identitas, nilai-nilai dan budaya yang membahayakan. *Other* hanya diterima setelah lebih dulu sisi substansialnya ditanggalkan, apalagi jika sisi substansial tersebut mengandung dimensi yang traumatik dari sudut pandang para pendukung pluralis. Dengan lain perkataan, toleransi langsung berhenti jika yang dihadapi adalah *the real Other*. Penolakan seorang pluralis terhadap kelompok anti-pluralisme karenanya menjadi ironi yang menyerupai ironi posmodernisme: menikmati kopi tanpa kafein, bir tanpa alkohol, sex tanpa kontak tubuh atau menerima kelompok fundamentalis tanpa fundamentalismenya.***